

Pancasila sebagai paradigma pendidikan karakter membentuk generasi unggul dan berintegritas

Najwa Tabina Raihanun Aprila

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110081@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, Paradigma,
Pendidikan Karakter, Generasi
Unggul, Berintegritas

Keywords:

Pancasila, Paradigm, Education
Character, Superior
Generation, Integrity

ABSTRAK

Pancasila adalah ideologi terbuka yang mengacu pada kumpulan doktrin dan gagasan yang dianut masyarakat Indonesia. Keistimewaan utamanya adalah sifatnya yang terbuka dan lentur, yang memungkinkan nilai-nilai dasarnya tetap kuat, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan perubahan masyarakat tanpa kehilangan makna aslinya. Sebagai paradigma, Pancasila berfungsi sebagai kerangka berfikir, landasan, dan tolak ukur utama bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan Pembangunan selalu berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil, demokrasi musyawarah, dan terwujudnya keadilan sosial. Dalam

konteks pendidikan karakter, Pancasila menempatkan lima sila sebagai kompas moral yang membimbing siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, adil dan beradab, cinta tanah air dan bersatu, demokratis dan menghargai musyawarah, serta peduli dan berjuang mewujudkan keadilan sosial. Secara spesifik, implementasi nilai-nilai Pancasila mampu mengembangkan generasi yang memiliki kompetensi unggul dan menjunjung tinggi prinsip moral serta berintegritas. Pembentukan karakter ini fokus pada lima elemen penting: Keagamaan, Nasionalisme, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas, yang diharapkan dapat memberikan penguatan dalam sistem pendidikan nasional agar substansi Pancasila dapat diwujudkan, sehingga menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan siap menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa.

ABSTRACT

Pancasila is an open ideology that refers to a collection of doctrines and ideas embraced by the Indonesian people. Its main specialty is its open and flexible nature, which allows its basic values to remain strong, but its application can adapt to the times, modernization, and societal changes without losing its original meaning. As a paradigm, Pancasila functions as a framework for thinking, foundation, and the main benchmark for all aspects of national and state life, ensuring that development is always oriented towards divinity, just humanity, deliberative democracy, and the realization of social justice. In the context of character education, Pancasila places five principles as a moral compass that guides students to become people who are faithful and pious, just and civilized, love their homeland and are united, democratic and respect deliberation, and care for and strive to realize social justice. Specifically, the implementation of Pancasila values can develop a generation that has high superior and upholds moral principles and integrity. This character building focuses on five important elements: Religiousness, Nationalism, Independence, Mutual Cooperation, and Integrity, which are expected to provide reinforcement in the national education system so that the substance of Pancasila can be realized, thus producing a generation that is responsible and ready to maintain the integrity and progress of the nation.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Prinsip dasar yang terkandung sebuah kualitas khusus, cita-cita serta harapan yang menjadi tujuan bangsa Indonesia yang harapannya mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata ialah pengertian dari Pancasila (Adityo, 2022a). Kesepakatan mengenai lima prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lahir setelah melalui perdebatan panjang di antara para pendiri bangsa. Rumusan tersebut kemudian dikenal sebagai *Pancasila*, yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya memiliki kaitan erat dengan dinamika menjelang kemerdekaan, termasuk komitmen pemerintahan Jepang terhadap pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk melengkapi perangkat pemerintahan negara yang baru berdiri. Istilah *Pancasila* sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata *panca* yang berarti lima dan *syila* yang bermakna dasar atau asas, sehingga mengandung pengertian lima prinsip utama yang wajib dipedomani serta dilaksanakan.

Sebagai sistem nilai dan cara pandang hidup bangsa Indonesia, Pancasila berperan sebagai kerangka berpikir yang memuat kumpulan ajaran, gagasan, teori, serta pengetahuan yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Fungsinya bukan hanya sebagai pedoman normatif dalam menghadapi persoalan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, tetapi juga sebagai acuan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi kehidupan nyata. Konsep “Ideologi Pancasila” merepresentasikan seperangkat prinsip dan pemikiran fundamental bangsa Indonesia yang tersusun secara sistematis dan rasional, mencakup unsur doktrin, teori, maupun ajaran yang terintegrasi. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi yang mengatur keyakinan dan pandangan hidup masyarakat secara metodis melalui struktur nilai yang terarah.

Sebagai filsafat yang bersifat terbuka, Pancasila menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman dan berbagai konteks sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Fleksibilitas ini menjadikan Pancasila mampu berinteraksi dengan dinamika modernitas sekaligus mempertahankan makna esensialnya sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keistimewaan utama Pancasila adalah sifatnya yang terbuka dan lentur, artinya nilai-nilai dasarnya tetap kuat, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan perubahan Masyarakat tanpa kehilangan makna aslinya (Hakim et al., n.d.). Dengan demikian, studi mengenai “*Pancasila sebagai Paradigma Pendidikan Karakter Membentuk Generasi Unggul dan Berintegritas*” bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai landasan utama (paradigma) dalam pelaksanaan pendidikan karakter nasional. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila mampu mengembangkan generasi yang memiliki kompetensi tinggi (unggul) dan menjunjung tinggi prinsip moral serta kejujuran (berintegritas).

Pembahasan

Pancasila sebagai Paradigma dan Pendidikan karakter

Menurut asal-usulnya dari beberapa bahasa, istilah paradigma memiliki beberapa makna, terlebih dalam bahasa Inggris yang artinya kondisi lingkungan. Sementara itu, dalam bahasa Yunani, istilah *paradigma* berasal dari kata *para* yang berarti “di samping” atau “di sebelah,” serta *deigma* yang bermakna “contoh” atau “model.” Sementara itu, dalam Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai suatu pola atau model yang menggambarkan berbagai fungsi yang mungkin dari suatu sistem yang ditampilkan (Kamdani Kamdani et al., 2025). Secara konseptual, paradigma dipahami sebagai seperangkat asumsi mendasar dan teoritis yang bersifat umum, yang berperan sebagai sumber nilai, norma, serta prinsip metodologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, paradigma sangat menentukan karakter, arah, dan watak dari ilmu itu sendiri. Dalam tataran filosofis, posisi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung makna bahwa setiap kegiatan pembangunan harus berlandaskan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Esensi nilai tersebut berpijak pada hakikat manusia sebagai entitas ontologis, yakni subjek utama pendukung nilai-nilai Pancasila sekaligus pilar utama keberlangsungan kehidupan bernegara (Fadilla et al., n.d.).

Dengan kata lain, fungsi Pancasila melihat dari paradigma nya ialah sebagai landasan, kerangka berfikir, serta tolak ukur utama bagi segala unsur berkehidupan berbangsa serta bernegara. Mengacu pada perihal tersebut, istilah “paradigma” mengacu pada pola pikir atau cara pandang menyeluruh yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, menjalankan Pembangunan nasional, serta menyelesaikan berbagai permasalahan. Artinya, semua proses perumusan hukum, Pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hingga reformasi birokrasi harus selalu berpedoman pada sejumlah nilai yang terkandung pada lima sila dari Pancasila. Maka dari itu, Pancasila menjamin bahwasanya masing-masing perilaku serta putusan pemerintah selalu berfokus pada kemajuan spiritual, moral, etika, serta pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil, demokrasi musyawarah, sekaligus terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemanfaatan Pancasila menjadi paradigma menjamin bahwasanya pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya tertuju pada kemajuan material saja. Pancasila juga berfungsi sebagai pembentukan Pendidikan karakter. Menurut Maulida (dalam Ariwinata & Ofianto, 2025) disebutkan bahwa, kedudukan Pancasila dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa sangat strategis. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi roh dan jiwa dalam setiap proses Pendidikan. Pendidikan berlandaskan Pancasila mampu menumbuhkan karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial yang tinggi.

Pendidikan kebangsaan, mengintegrasikan Pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan, Sejarah, dan budaya dalam kurikulum Pendidikan formal. Hal ini juga akan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya identitas nasional di kalangan generasi muda (Faslah, 2024). Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dan

sumber nilai etika dalam seluruh proses Pendidikan karakter di Indonesia, yang bertujuan membentuk pribadi peserta didik agar memiliki sifat dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa. Peran ini menempatkan lima sila sebagai Kompas moral yang membimbing siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, adil dan beradab, cinta tanah air dan Bersatu, demokratis dan menghargai musyawarah, serta peduli dan berjuang mewujudkan keadilan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, Pendidikan karakter Pancasila berupaya menghasilkan generasi yang berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan siap menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa.

Konsep Pendidikan karakter

Peran Pancasila dalam membentuk karakter serta jati diri bangsa memiliki posisi yang sangat strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial yang harus menjadi inti dan jiwa dalam setiap proses pendidikan. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila menjadi sarana penting untuk menumbuhkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, mencintai tanah air, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan karakter sendiri ialah sebuah sistem yang dirancang secara terencana untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada individu, terutama peserta didik, yang mencakup tiga aspek utama: pemahaman nilai, kesadaran atau kemauan untuk menerapkannya, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks globalisasi, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi strategi penting untuk menghadapi perubahan sosial dan budaya. Rahayu (dalam Handitya, 2021) menegaskan bahwa terdapat lima elemen utama pembangunan karakter dalam dimensi pendidikan, yaitu: (1) keagamaan, yang berfokus pada penguatan nilai-nilai teologis agar peserta didik mampu menghormati keberagaman keyakinan; (2) nasionalisme, yang menumbuhkan sikap menghargai warisan budaya dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi; (3) kemandirian, yang mengembangkan tanggung jawab, kreativitas, dan kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan; (4) gotong royong, yang menanamkan semangat kerja sama dan solidaritas sosial sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan individualisme; dan (5) integritas, yang membentuk pribadi jujur, berkomitmen, serta bertanggung jawab. Seluruh elemen tersebut memiliki keterkaitan erat dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, keberadaan Pancasila diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan nasional agar nilai-nilai dasarnya benar-benar terimplementasi dalam kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, keikutsertaan pada aktivitas yang mengutamakan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, juga membantu memperdalam konsep-konsep tersebut. Berpartisipasi dalam diskusi dan forum yang membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Pembangunan nasional juga dapat menjadi sarana yang efektif. Upaya memperkuat karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan terhadap pendidikan formal maupun nonformal yang mengintegrasikan pembelajaran Pancasila dalam kurikulum. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui dorongan

kepada lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan perhatian khusus terhadap pengajaran nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam konteks pembangunan nasional (Fadilla et al., n.d.).

Karakter pada hakikatnya merefleksikan kualitas moral dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang menampilkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama menunjukkan karakter mulia, sedangkan perilaku yang didasari ketidakjujuran, kekerasan, atau keserakahan menggambarkan karakter yang buruk. Istilah karakter berkaitan erat dengan *personality*, di mana seseorang disebut memiliki karakter apabila tindakannya selaras dengan norma moral yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang efektif harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Keseimbangan ketiga aspek tersebut penting agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan tanpa tekanan atau doktrin (Tharaba, 2020).

Nilai-nilai karakter dalam sila-sila Pancasila

Dasar negara bukan satu-satunya fungsi Pancasila, melainkan juga sebagai cetak biru (*blueprint*) yang memandu pembentukan karakter unggul bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari pembentukan karakter ini adalah Integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh sila. Di era globalisasi dan digitalis yang semakin kompleks, Pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak dalam system Pendidikan, khususnya dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, tangguh, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Perubahan sosial yang cepat, banjir informasi, dan krisis identitas yang melanda generasi muda menuntut adanya pendekatan pendidikan yang tidak sekadar bersifat kognitif saja, melainkan juga menyentuh segi afektif serta spiritual Oktaviani (dalam Al Faruq et al., 2025). Berikut nilai-nilai luhur yang secara intrinsik dapat membentuk karakter bangsa Indonesia:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Menanamkan karakter Religiositas, di mana setiap warga negara diwajibkan berpegang teguh pada keyakinan agamanya, sambil menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keragaman spiritual. Mengakui dan percaya kepada tuhan YME sejalan dengan anutan agama dari masing-masing kepercayaan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menumbuhkan karakter Kemanusiaan universal. Nilai ini mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan martabat tinggi, diakui nya persamaan hak serta kewajiban tanpa memandang suku, ras, atau agama. Ini adalah fondasi etika sosial, menuntut kita untuk bersikap adil, anti-diskriminasi, dan memiliki empati yang mendalam. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menunjukkan integritas moral dalam perlakuan antar sesama.

Persatuan Indonesia

Nilai kunci yang terkandung adalah Persatuan dan nasionalisme. Karakter ini mendorong pengorbanan diri untuk urgensi bangsa beserta negara melebihi urgensi pribadi atau kelompok. Ia mendorong semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana

perbedaan dihargai sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan, sehingga tercipta stagnansi serta keutuhan nasional.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Nilai ini mewajibkan kita memiliki karakter yang menghargai dialog, musyawarah, dan keterwakilan suara rakyat. Hikmat dalam kebijaksanaan sudah seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, bukan emosi atau kekuatan mayoritas semata, melainkan mengedepankan akal sehat dan tanggung jawab kolektif.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial mempunyai nilai yang mendorong karakter gotong royong, kerja keras, dan kepedulian terhadap pemerataan ekonomi dan sosial. Karakter ini menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi, serta menuntut adanya keseimbangan hak serta kewajiban agar setiap penduduk mampu menikmati hasil pembangunan dengan adil. Dengan memegang teguh seluruh nilai ini, Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, bermoral, dan sejahtera secara lahir dan batin. Menurut (Tharaba, 2020) menegaskan bahwasanya semangat membangun bangsa yang berkarakter telah ditekankan oleh Soekarno melalui gagasan *nation and character building*. Tujuan utama dari gagasan tersebut ialah membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam amanat *Pembangunan Semesta Berencana*, Soekarno menekankan pentingnya karakter sebagai *mental investment*, yakni penegasan bahwasanya aspek mental yang dimaksud sebagai mental Pancasila ialah elemen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan nasional.

Generasi unggul dan Berintegritas

Menurut Rahayu (dalam Adityo, 2022b) menjabarkan bahwasanya Pancasila berfungsi sebagai prinsip mendasar yang mengandung seperangkat nilai, harapan, serta cita-cita yang menjadi orientasi bangsa Indonesia untuk diwujudkan dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk arah dan tujuan nasional agar senantiasa sejalan dengan jati diri bangsa.. Dalam implementasi Pancasila, generasi unggul didefinisikan secara operasional sebagai individu yang memiliki kompetensi intelektual tinggi (kecerdasan kognitif dan keterampilan), yang sejalan dengan prinsip-prinsip luhur bangsa. Keunggulan tersebut ialah perwujudan dari pelaksanaan Sila keempat atau Kerakyatan yang menuntut hikmat kebijaksanaan, serta Sila kelima atau Keadilan Sosial yang membutuhkan kerja keras dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk pemerataan. Secara konkret, generasi unggul adalah lulusan yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah bangsa dan bersaing di kancah global, namun tetap berlandaskan pada semangat gotong royong dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Generasi Berintegritas adalah manifestasi karakter moral dari sila-sila Pancasila, terkhusus Sila pertama atau Ketuhanan beserta Sila kedua atau Kemanusiaan. Integritas secara operasional diartikan sebagai konsistensi perilaku yang menjunjung

tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan dan etika kemanusiaan yang adil dan beradab. Generasi ini berkomitmen penuh pada anti-korupsi, menolak kecurangan, dan memiliki keberanian moral untuk menegakkan kebenaran. Dalam implementasi Sila ke-3 (Persatuan), integritas juga berarti loyalitas dan ketulusan dalam menjaga keutuhan bangsa. Integritas inilah yang menjadi benteng moral agar keunggulan intelektual tidak disalahgunakan.

Pendidikan harus menghasilkan individu yang cerdas dalam ilmu pengetahuan (Unggul) sekaligus kokoh dalam moralitas (Berintegritas). Jika keunggulan adalah mesin penggerak pembangunan yang adaptif, maka integritas adalah kemudi yang memastikan arah pembangunan tersebut tetap menuju cita-cita Keadilan Sosial untuk semua warga Indonesia. Melalui penanaman kedua karakter ini yang secara simultan mewujudkan kecerdasan teknis dan kecerdasan etis, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya manusianya mampu memimpin pembangunan bangsa secara kompeten, jujur, dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip fundamental Pancasila. Lebih dari itu, penerapan nilai Pancasila juga dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, yang didukung oleh kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Ini meningkatkan internalisasi prinsip-prinsip Pancasila sehingga siswa tidak sekadar paham konsepnya saja, tetapi juga dapat mengamalkan prinsip-prinsip tersebut pada keseharian. Pembiasaan sikap positif dan nilai moral melalui bimbingan guru serta lingkungan sekolah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila (Maulida & Oktavia, n.d.).

Kesimpulan

Pancasila memiliki peran sentral dan strategis sebagai paradigma (landasan utama dan kerangka berpikir) dalam pelaksanaan pendidikan karakter nasional. Fungsi Pancasila sebagai paradigma memastikan bahwa setiap aspek pembangunan, termasuk pendidikan, selalu berorientasi pada nilai-nilai esensial dari lima silanya, selayaknya Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil, Persatuan, Permasyarakatan yang demokratis, serta terwujudnya Keadilan Sosial. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila pada sistem pendidikan bertujuan ganda, yaitu menciptakan Generasi Unggul dengan kompetensi tinggi, kemampuan adaptif, dan siap bersaing di era modern, sekaligus melahirkan Generasi Berintegritas yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa kemajuan intelektual dan teknologi (keunggulan) selalu dibimbing oleh kekuatan moral dan etika yang kuat (integritas).

Keunggulan Pancasila terletak pada sifatnya yang terbuka dan adaptif, memungkinkan nilai-nilai fundamental di dalamnya tetap teguh meskipun dihadapkan pada arus modernisasi dan perubahan zaman. Fleksibilitas ini menjadikan Pancasila mampu menyesuaikan penerapannya dengan dinamika sosial tanpa kehilangan makna dasarnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi strategi utama dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya di era global, karena melalui penerapan nilai tersebut dapat tumbuh peserta didik yang beriman, berakhlak luhur, mencintai tanah air, serta memiliki semangat solidaritas sosial yang

kuat. Oleh karena itu, substansi Pancasila harus terus diperkuat dalam sistem pendidikan nasional, mengintegrasikan lima elemen pembangunan karakter Keagamaan, Nasionalisme, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kuat, bertanggung jawab, dan siap menjaga kemajuan dan keutuhan bangsa.

Saran

Pertama, penguatan Implementasi Kurikulum: Institusi pendidikan disarankan untuk secara lebih terstruktur mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila pada semua pembelajaran serta aktivitas ekstrakurikuler, bukan sebagai pembelajaran yang terpisah. Implementasi harus menekankan pada aspek tindakan (Tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai) dibandingkan hanya pengetahuan dan kesadaran (komponen pendidikan karakter). Kedua, model Pembelajaran Berbasis Proyek dan Kolaborasi: Perlu dikembangkan model pembelajaran yang mendorong karakter Mandiri (kreatif, tanggung jawab, dan percaya diri) dan Gotong Royong (kerja sama untuk persatuan). Hal ini dapat dilakukan melalui proyek berbasis masalah nyata yang menuntut peserta didik menerapkan keunggulan intelektual dengan integritas moral dan semangat kebersamaan. Ketiga, keteladanan Pendidik dan Lingkungan: Penanaman karakter Integritas harus dimulai dari keteladanan para pendidik dan seluruh elemen sekolah. Lingkungan pendidikan harus menciptakan budaya yang transparan, jujur, dan adil, sehingga Pancasila benar-benar menjadi kerangka etika yang hidup dan diamalkan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022a). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA. *DEVOSI*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.33558/devosi.v3i2.4473>
- Al Faruq, U., Arifuddin, N., Ma'arif, A. S., & Husniyah, F. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Panca Jiwa di Pesantren: Strategi dan Tantangan dalam Era Digital. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 10(1), 1–18. <http://repository.uin-malang.ac.id/24081/>
- Ariwinata, Y., & Ofianto, O. (2025). Menarik Akar Sejarah Pendidikan Indonesia: Pancasila sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Bangsa di Era Kontemporer. *TSAQOFAH*, 5(4), 3579–3591. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6400>
- Fadilla, D., Azzaro, N. H., & Yanti, N. R. (n.d.). *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Nasional*.
- faslah, romi. (2024). *Identitas nasional, geotragi, dan geopolitik mebangun keberlanjutan dan kedaulatan*. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hakim, H. M., Qurrinnadiroh, R., & Wati, R. K. (n.d.). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*.
- Handitya, B. (2021). *MEMBANGUN KARAKTER PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0*.

- Kamdani Kamdani, Muhammad Dwi Ramadan, & Muhammad Abdul Azis. (2025). Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Bermasyarakat Bernegara. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 274–284. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1547>
- Maulida, M., & Oktavia, N. (n.d.). *Pendidikan Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Bangsa Yang Berintegritas*.
- Tharaba, M. F. (2020). Mencari Model Pendidikan Karakter Di Sekolah. *J-MPI*, 5(1), 66–81. <http://repository.uin-malang.ac.id/7969/>